

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2007

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Nining Yunia Artanti

NIM : 042114094

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2007

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Nining Yunia Artanti

NIM : 042114094

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010**

Skripsi
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD)

Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur Tahun 2007



Pembimbing I:

Firma Sulistiyowati.SE., M.Si., QIA.

Tanggal 12 Februari 2010

Skripsi

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)**

Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2007

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Nining Yunia Artanti
NIM : 042114094

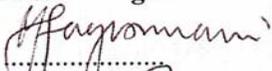
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 23 Maret 2010
dan dinyatakan memenuhi syarat

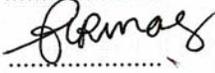
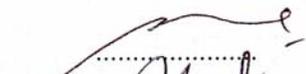
Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani, SE., M.Si., Akt., QIA.
Anggota	Firma Sulistiyowati, SE., M.Si., QIA.
Anggota	Josephine Wuri, SE., M.Si.
Anggota	A. Diksa Kuntara, SE., MFA., QIA.

Tanda Tangan


.....

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 31 Maret 2010

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan




Dis P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Nining Yunia Artanti

Nomor Mahasiswa : 042114094

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di Yogyakarta

Pada Tanggal: 31 Maret 2010

Yang menyatakan



(Nining Yunia Artanti)

**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)”. Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2007. Dan dimajukan untuk di uji pada tanggal 23 Maret 2010 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Maret 2010
Yang membuat pernyataan



Nining Yunia Artanti

ABSTRAK
ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)
(Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2007)

NINING YUNIA ARTANTI
042114094
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan melalui Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD). (2) mengetahui tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas APBD tahun 2007 di Kabupaten Magetan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Jawa Timur tahun 2007. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan teknik observasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis varians, teknik analisis efisiensi dan teknik analisis efektivitas. Analisis varians digunakan untuk membandingkan selisih/perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan dalam laporan keuangan. Analisis efisiensi digunakan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dan Analisis efektivitas digunakan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Rencana anggaran pendapatan lebih kecil daripada realisasinya dengan varians sebesar Rp. 14.565.374.134,84 atau 2,50 %. Pada pos belanja, jumlah anggaran belanja lebih kecil dari pada realisasinya dengan varians sebesar Rp. 59.952.815.120,56 atau 9,57 %. (2) Tingkat efisiensi APBD tahun 2007 Kabupaten Magetan menurut Pemerintah Daerah dimana selama periode penelitian Tahun Anggaran 2007 dengan tingkat efisiensi sebesar 95,02 % artinya kurang efisien dan tingkat efektivitas APBD tahun 2007 Kabupaten Magetan menurut Pemerintah Daerah dimana selama periode penelitian Tahun Anggaran 2007 dengan tingkat efektivitas sebesar 102,50 % artinya sangat efektif.

ABSTRACT

THE FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF REGIONAL GOVERNMENT BUDGET (APBD) (A Case Study at Magetan Regency Government in 2007)

NINING YUNIA ARTANTI
042114094
SANATA DHARMA UNIVERSITY

YOGYAKARTA
2009

The objectives of this research were: (1) To know the financial performance of Magetan regency government through its regional government budget. (2) To know the efficiency and the effectiveness of 2007 regional government budget of Magetan regency.

The type of the research used was case study at Magetan regency government, East Java in 2007. The techniques of data collecting used in the research were interview, documentation and observation.

The data analysis techniques used were variance analysis, efficiency and effectiveness analysis techniques. Variance analysis was used to compare the variance or difference between the actual performance and the one planned in the financial report. The efficiency analysis was used to know how big was the efficiency of the implementation of a project or activity, and the effectiveness analysis was used to figure out whether a program was successful in obtaining the goals of the program.

Based on the data analysis, the conclusions was: (1) The plan of the income budget was is smaller than its realization with the variance of Rp. 14.565.374.134,84 or 2,50%. In the Expenditure post, the amount of the expenditure was smaller than its realization with the variance of Rp. 59.952.815.120,56 or 9,57 %.

(2) The efficiency of the 2007 regional government budget in Magetan regency, based on the local government during the research period of 2007 was 95,02%. It meant that it was less efficient and the effectiveness of the 2007 regional government budget in Magetan regency based on the local government during the research period of 2007 was 102,50%. it meant that it was very effective.

HALAMAN PERSEMBAHAN

HONESTY IS THE BEGINNING OF ALL GOODNEES IN OUR LIFE

Karya ini kupersembahkan kepada:

Allah S.W.T

Alm Bapak

Ibu Tercinta

Mb Nope dan M' Nur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Anggaran Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD)". Studi kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur Tahun 2007.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan perlindungan dan tuntunanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Bapak Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
4. Ibu Firma Sulistiyowati, SE., M.Si., QIA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, semangat dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen- dosen Fakultas Ekonomi yang telah banyak membimbing penulis.

6. Staf Sekretariat Fakultas Ekonomi yang telah banyak membimbing penulis.
7. Staf dan Karyawan PUSD yang telah memberikan fasilitas kepada penulis.
8. Bapak Drs. H. Sumantri, MM, sebagai Bupati Magetan Propinsi Jawa Timur.
9. Staf dan karyawan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur.
10. Mbak Icha yang telah membantu penulis untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini.
11. Ibu dan alm Bapak tercinta, atas kasih sayang, doa, bantuan, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis.
12. Kakak-kakakku tersayang : Mas Wiwit, Yu Epik, Mas Nono, Mbak Narti, Mas Parno dan Mbak Yanik atas nasehat dan doanya.
13. Adekku Yuni, Angga dan Ajeng yang selalu memberikan semangat.
14. Mas Lipna yang selalu menemani, memberikan dukungan dan perhatian.
15. Sahabatku F4 (Mita, Tian. Arum) I Luv u all.
16. Mbak Dian, Mas Onal, Mas Wahyu, Rulli, dan Mas Jufri yang selalu memberikan bantuan kepada penulis.
17. Temen-temanku (Eri, Lia, Ratih, Crysta, Anggi, Erni, Citra, Siska dan semua mahasiswa Akuntansi 2004) terima kasih atas kebersamaan selama perjalanan kuliah hingga akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini.

18. Teman-teman Pink House (Azma, Ratih, Yayuk, Mbak Aini, Mbak Ira, Mbak Yanti, Mbak Andri, Mbak Dwi, Mbak Mel dan Mbak Nawa) yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis dan memberi keceriaan.
19. Temen-temanku (Yeni, DD, Nila, Pia, Mb Ari, Icha, Tika, dan Ratna) yang selalu menemani dan memberi dorongan penulis.
20. Temen-temen KKP (yen-yen, Loren, Aris) yang selalu memberi perhatian & semangat penulis.
21. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut memberikan dukungan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 31 Maret 2010

Penulis

Nining Yunia Artanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PUBLIKASI KARYA TULIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penulisan.....	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Kinerja	6
1. Definisi Kinerja	6
2. Definisi Indikator Kinerja	7
B. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	7
1. Anggaran	7
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	8
3. Karakteristik APBD.....	11
4. Fungsi APBD	12
C. Analisis Kinerja Keuangan APBD.....	13
1. Analisis Varians	13

D. Efisiensi	15
1. Efisiensi APBD	15
2. Analisis Efisiensi.....	16
E. Efektivitas	17
1. Efektivitas APBD.....	17
2. Analisis Efektivitas	18
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	20
B. Tempat dan Waktu Penelitian	20
C. Subjek dan Objek Penelitian	20
D. Teknik Pengumpulan Data.....	21
E. Teknik Analisa Data.....	22
1. Analisis Varians	22
2. Analisis Efisiensi dan Analisis Efektivitas	24
 BAB IV. GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Kabupaten Magetan	28
B. Lokasi, Tanah dan Iklim	29
C. Pemerintahan	30
D. Kependudukan	31
E. Sosial	33
F. Pertanian	44
G. Industri	45
H. Air dan Listrik	45
I. Perdagangan	46
J. Perhotelan	47
K. Perhubungan	47
L. Keuangan	48
M. Produk Domestik Regional Bruto	49

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	50
B. Penjelasan Pos Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2007	54
1. Pendapatan Daerah.....	54
2. Belanja Daerah.....	60
3. Pembiayaan	63
C. Analisis Data	67
1. Analisis Varians	67
2. Analisis Efisiensi dan Efektivitas.....	70
D. Pembahasan	73
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Keterbatasan Penelitian.....	75
C. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Contoh Tabel Analisis Varians	15
Tabel 2.2	Kriteria Kinerja Keuangan.....	17
Tabel 2.3	Kriteria Kinerja Keuangan.....	19
Tabel 3.1	Contoh Tabel Analisis Varians	23
Tabel 3.2	Kriteria Kinerja Keuangan	25
Tabel 3.3	Kriteria Kinerja Keuangan	26
Tabel 4.1	Penduduk Akhir Tahun Menurut Kelompok Umur	32
Tabel 4.2	Sekolah, Gedung, Kelas, Murid dan Guru Menurut Tingkat/ Jenis Sekolah	34
Tabel 4.3	Banyaknya Lulusan Sekolah.....	34
Tabel 4.4	Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-kanak	35
Tabel 4.5	Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar.....	36
Tabel 4.6	Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah	37
Tabel 4.7	Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Umum dan Kejujuran	38
Tabel 4.8	Sekolah, Kelas, Murid dan Guru di Bawah Non Dikmas Menurut Tingkat dan Status Sekolah	39
Tabel 4.9	Sekolah, Murid, dan Guru Madrasah Diniyah	40
Tabel 4.10	Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Ibtidaiyah.....	41
Tabel 4.11	Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Tsanawiyah.....	42
Tabel 4.12	Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Aliyah	43
Tabel 5.1	Laporan Realisasi Anggaran	50
Tabel 5.2	Pendapatan Asli Daerah	55
Tabel 5.3	Pendapatan Transfer.....	58
Tabel 5.4	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	58
Tabel 5.5	Transfer Pemerintah Propinsi.....	59
Tabel 5.6	Belanja Daerah	60

Tabel 5.7 Belanja Operasi	61
Tabel 5.8 Belanja Modal	62
Tabel 5.9 Penerimaan Pembiayaan	64
Tabel 5.10 Pengeluaran Pembiayaan	64
Tabel 5.11 Ringkasan Perhitungan APBD.....	66
Tabel 5.12 Ringkasan Perhitungan APBD.....	68
Tabel 5.13 Analisis Varians	69
Tabel 5.14 Kesimpulan Analisis Varians.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi pembangunan suatu bangsa tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari level-level pemerintahan yang ada dibawahnya, hal tersebut tentunya hanyalah kewenangan yang hanya dimiliki oleh pemerintah daerah yang terbagi-bagi melalui hirarki propinsial, kabupaten baik kota madya dan daerah istimewa.

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini untuk mengelola anggaran keuangannya maka sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 33 Tahun 2004, serta mengacu pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 3 yang sangat diharapkan oleh banyak pihak yaitu sistem pembagian keuangan yang adil, demokratis, transparan dan efisien maka tentunya memberikan semangat bagi seluruh warga Negara dan Pemerintah Daerah khususnya untuk memberdayakan sumber daya ekonomi yang ada baik secara mandiri, ekonomis, efisien, dan efektif. Melihat dari segi pelaksanaan otonomi daerah yang sedang marak-maraknya diselenggarakan, tentunya hal tersebut memberikan kewenangan yang luas pemerintah daerah untuk mengatur dan memanfaatkan potensi daerah yang ada.

Maka baik Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Pemerintah Daerah Propinsi diberi hak otonomi untuk merencanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri-sendiri sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Serta berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran daerah kepada masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah diberi kebebasan menentukan prioritas pembangunan daerah selama tetap memperhatikan keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada suatu anggaran. Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisien, dan efektifitas (Mardiasmo, 2002: 117).

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara Negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang dihasilkan dalam suatu

periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan (Mahsun, 2006 : 26).

Berangkat dari keingintahuan untuk menilai kinerja keuangan daerah maka tentunya hal tersebut tidaklah lepas dari data-data anggaran dan tetap berpatokan pada kemampuan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangannya melalui APBD dengan asumsi bahwa semua syarat yang digunakan untuk menentukan hasil metode analisis varians, tingkat efisiensi maupun efektivitasnya sudah terpenuhi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007 dengan menggunakan metode analisis varians?
2. Bagaimana APBD tahun 2007 di Kabupaten Magetan dilihat dari segi efisiensi dan efektivitasnya?

C. Tujuan Penelitian:

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007 dengan menggunakan metode analisis varians.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas APBD Tahun 2007 di Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian:

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Magetan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan untuk masa yang akan datang.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan bacaan, wawasan, dan pengetahuan, baik bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap topik yang diteliti oleh penulis.
3. Bagi Penulis
Dengan penelitian ini penulis dapat memperluas wawasan serta memperoleh pengetahuan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan:**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian dari studi pustaka.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

Pada bab ini diuraikan mengenai sejarah Kabupaten Magetan dan lain-lain.

BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini, dengan melihat hasil penelitian diuraikan kesimpulan yang dapat diambil dan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada, diharapkan dapat berguna bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kinerja.

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. (Mahsun, 2006: 25).

1. Definisi Kinerja

Menurut Suyadi (1992: 2), adalah

“Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Menurut Mahsun (2006: 25), adalah

“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik planning suatu organisasi”.

2. Definisi Indikator Kinerja

Menurut Bastian (2005: 267), adalah

“ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), manfaat (benefits), dan dampak (impacts)”.

Menurut Lohman dalam Mahsun (2006: 71), adalah

“suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi”.

B. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Anggaran

Dibawah ini ditunjukkan beberapa pengertian anggaran, antara lain:

- a) “Anggaran” dalam arti “*begrooting*” atau “*estimate*” mempunyai makna “penentuan”, “patokan” atau “penetapan besarnya uang”. (Mamesah, 1995).
- b) Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi, 1993).
- c) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. (Mardiasmo, 2001).
- d) Anggaran adalah perkiraan/ perhitungan/ aturan/ taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005).

Dari beberapa pengertian anggaran sebagaimana diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut (Bastian, 2000: 81):

- a) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- b) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
- c) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab guna mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
- d) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
- e) Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.
- f) Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah. Untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakat untuk menjadikan pilihan-pilihan tersebut. Pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi pertama, pengumpulan sumber daya yang mencukupi dengan cara yang tepat, dan kedua, pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut secara responsif, efisien dan efektif. Fungsi pertama berkaitan dengan sisi

penerimaan (pendapatan) dari APBD sedangkan fungsi kedua dari sisi pengeluaran (belanja). (Nadaek, 2003: 11).

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas menjalankan mandat dari rakyat membutuhkan biaya yang besar. Untuk pembiayaan tersebut pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber penerimaan daerah yang dituangkan dalam anggaran. Anggaran yang dibuat akan mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga akan terlihat (Mardiasmo, 2003):

- a) Adanya pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pungutan lain-lain oleh pemerintah misalnya untuk memperlancar ekonomi.
- b) Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya.
- c) Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi.

Dibawah ini ditunjukkan beberapa pengertian APBD, antara lain:

- a) Pengertian APBD menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah adalah

“Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

b) Pengertian APBD menurut Mamesah (1995: 20) pada orde baru adalah

“Rencana operasional Keuangan Pemerintah Daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-setingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud”.

Definisi menurut Mamesah (1995: 20-21) mengandung unsur:

- 1) Rencana operasional daerah, yang menggambarkan adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dimana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan, dan jenis proyek.
- 4) Untuk keperluan satu tahun anggaran yaitu April sampai dengan Maret dan Januari sampai dengan Desember.

c) Pengertian APBD menurut Halim (2002: 24) adalah

“Rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran”.

3. Karakteristik APBD

Karakteristik APBD menurut Abdul Halim (2002: 17), antara lain:

- a) APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah.
- b) Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan tradisional (line item) yaitu anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.
- c) Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan, dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintahan Daerah Tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintahan Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bersifat vertikal.
- d) Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penentuan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/ audit bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah.

- e) Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan 3 unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan unsur hasil program (untuk proyek-proyek daerah).
- f) Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan tata buku anggaran yaitu anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

4. Fungsi APBD

Fungsi APBD menurut Mamesah (1995: 18), antara lain:

- a) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.
- b) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
- c) Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan Pemerintah Daerah.
- d) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah didalam batas-batas tertentu.

C. Analisis Kinerja Keuangan APBD

Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dapat dicapai pada anggaran yang telah dibuat daerah dengan menganalisis perbedaan antara realisasi dengan target yang dianggarkan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sehingga nantinya dapat dihasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi tertentu sesuai dengan kriteria penilaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan.

Penilaian laporan kinerja keuangan diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. (Mardiasmo, 2002: 123).

1. Analisis Varians

Teknik pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diketahui apakah terdapat selisih *underspending* atau *overspending*. (Mahsun, 2006 : 150).

Fokus analisis varians pada:

a) Varians Pendapatan/ Penerimaan

b) Varians Belanja/ Pengeluaran

Dari hasil analisis varians kemudian dinyatakan dalam bentuk prosentase antara realisasi dengan yang dianggarkan (Nugroho, 2003: 32).

Analisis selisih anggaran dapat dirinci menjadi 2, (Mahsun 2006 : 152) yaitu :

Analisis Selisih Pendapatan/ Penerimaan = Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan

Analisis Selisih Belanja/ Pengeluaran = Realisasi Pengeluaran – Anggaran Pengeluaran

$$\text{Analisis Varians (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Dari hasil analisis varians dapat diketahui (PAU SE-KP, 2003), yaitu:

- a) Rencana anggaran pendapatan lebih besar dari pada realisasi, maka selisihnya bersifat menurun. Sedangkan pada pengeluaran atau belanja jika anggaran lebih besar dari pada sesungguhnya (aktual), maka selisihnya bersifat menguntungkan.
- b) Rencana anggaran pendapatan sama dengan realisasi, maka selisihnya bersifat sama. Sedangkan pada pengeluaran atau belanja jika sama dengan sesungguhnya terjadi (aktual), maka selisihnya sama dengan nol.
- c) Rencana anggaran pendapatan lebih kecil dari pada realisasi, maka selisihnya naik. Sedangkan pada pengeluaran atau belanja jika anggaran lebih kecil dari pada sesungguhnya terjadi (aktual), maka selisihnya bersifat tidak menguntungkan.

Laporan perhitungan APBD memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD yang dianggarkan. Yang dimaksud adalah selisih antara realisasi penerimaan/pendapatan dengan anggaran penerimaan/pendapatan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran (Mardiasmo, 2003).

Berikut tampilan tabel yang menunjukkan jumlah selisih dan presentase tingkat ketercapaian anggaran (Mahsun, 2006 : 156) :

Tabel 2.1

Contoh Tabel Analisis Varians

No	Uraian	Jumlah		Selisih	%	Capaian
		Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7

D. Efisiensi

1. Efisiensi APBD

Pengertian efisiensi menurut Jones dan Pendlebury (1996), adalah suatu perbandingan atau rasio antara output dengan input.

Rasionalitas hampir selalu berkaitan dengan efisiensi, artinya secara ekonomis suatu tindakan dikatakan rasional bilamana tindakan itu ada kaitannya dengan usaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya.

Maka didalam proses penganggaran mulai diarahkan untuk berorientasikan pada hasil melalui pengukuran efisiensi.

2. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan atau proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah dengan menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dengan total realisasi pendapatan daerah dikalikan seratus dalam bentuk persentase (Mardiasmo, 2002: 8).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan total realisasi pendapatan menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah. Adapun kriteria penilaian kinerja yang diukur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Kinerja Keuangan

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
>90% - 100%	Kurang Efisien
>80% - 90%	Cukup Efisien
≥60% - 80%	Efisien
Dibawah dari 60%	Sangat Efisien

Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996

Dari tabel kriteria kinerja keuangan tersebut diatas, maka usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan dikatakan efisien jika persentase kinerja keuangannya antara 60% - 80%. Sebaliknya dikatakan tidak efisien jika persentase kinerja keuangannya berada diatas 100%.

E. Efektivitas

1. Efektivitas APBD

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (Mardiasmo, 2002: 132).

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Maka didalam proses penganggaran mulai diarahkan untuk berorientasikan pada keluaran (output) dan dampak (outcome) melalui pengukuran efektivitas.

2. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah dengan menggunakan ukuran tingkat efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi pendapatan dengan total anggaran pendapatan daerah dikalikan seratus dalam bentuk persentase (Mahsun, 2006: 18).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan menggunakan ukuran efektivitas tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah. Adapun kriteria penilaian kinerja yang diukur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3**Kriteria Kinerja Keuangan**

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektif
$\geq 60\%$ - 80% ^{vb}	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996

Dari tabel kriteria kinerja keuangan tersebut diatas, maka usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan dikatakan efektif jika persentase kinerja keuangannya antara >90% - 100%. Sebaliknya dikatakan tidak efektif jika persentase kinerja keuangannya berada dibawah dari 60%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, yaitu penelitian terhadap suatu objek dan data pada waktu tertentu di Pemerintahan Kabupaten Magetan Jawa Timur untuk tahun anggaran 2007. Dimana data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan hanya berlaku untuk menilai kinerja keuangan APBD tahun 2007 di Kabupaten Magetan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat : Pemerintahan Kabupaten Magetan

Waktu : Januari-Maret 2009

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah:

- a) Pemerintah Kabupaten Magetan.
- b) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Magetan.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah:

- a) Laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengertian observasi menurut Golu (2002: 116) adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap hal-hal yang dipandang perlu dan ada hubungannya dengan permasalahan pokok atau objek yang diteliti yaitu tentang proses penggunaan data APBD untuk analisis kinerja keuangan di Kabupaten Magetan dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja berikut realisasinya.

2. Wawancara

Pengertian wawancara menurut Golu (2002: 119) adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan orang yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi menurut Golu (2002: 123) adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

E. Teknik Analisa Data

1. Permasalahan pertama, dengan melihat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dilihat dari APBD dengan menggunakan metode analisis varians.

Langkah- langkah analisis adalah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data hasil penelitian yaitu Laporan Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
- b) Melakukan analisis varians

Analisis varians berfokus pada varians pendapatan/penerimaan dan varians belanja/pengeluaran. Dari hasil analisis varians tersebut, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase antara realisasi anggaran dengan yang dianggarkan.

Analisis selisih anggaran dapat dirinci menjadi 2, (Mahsun 2006 : 152) yaitu :

Analisis Selisih Pendapatan/ Penerimaan = Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan

Analisis Selisih Belanja/ Pengeluaran = Realisasi Pengeluaran – Anggaran Pengeluaran

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Lebih jelasnya dilakukan dengan menggunakan tabel analisis varians dibawah ini:

Tabel 3.1**Contoh Tabel Analisis Varians**

No	Uraian	Jumlah		Selisih	%	Capaian
		Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7

c) Menarik kesimpulan dari hasil analisis varians yaitu:

1. Pada pendapatan, jika rencana anggaran pendapatan $>$ dari pada realisasi, maka realisasinya lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan, artinya bersifat menurun. Sedangkan pada pengeluaran atau belanja, jika anggaran $>$ dari pada sesungguhnya terjadi (aktual). Maka realisasinya turun dari anggaran yang telah ditetapkan diartikan menguntungkan.
2. Pada pendapatan, jika rencana anggaran pendapatan = dengan realisasi, maka rencana anggaran dengan realisasi adalah sama. Pada pengeluaran atau belanja, jika anggaran = sesungguhnya terjadi (aktual), maka selisihnya sama dengan nol.
3. Pada pendapatan, jika rencana anggaran pendapatan $<$ dari pada realisasi, maka realisasinya lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan, artinya bersifat meningkat. Pada pengeluaran atau

belanja, jika anggaran < dari pada sesungguhnya terjadi (aktual), maka realisasinya lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan diartikan tidak menguntungkan.

2. Permasalahan kedua, dengan menentukan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran 2007.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data hasil penelitian yaitu Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b) Melakukan analisis efisiensi dan analisis efektivitas

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/ proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input, yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dengan total total realisasi pendapatan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase (Mardiasmo, 2002: 8):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan total realisasi pendapatan yang menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah.

Adapun kriteria penilaian kinerja yang diukur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2**Kriteria Kinerja Keuangan**

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
>90% - 100%	Kurang Efisien
>80% - 90%	Cukup Efisien
≥60% - 80%	Efisien
Dibawah dari 60%	Sangat Efisien

Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996

Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan perbandingan antara outcome dengan output, yaitu perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase. (Mahsun, 2006: 191)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan yang menggunakan ukuran efektivitas tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah.

Adapun kriteria penilaian kinerja yang diukur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3**Kriteria Kinerja Keuangan**

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektif
≥60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996

- c) Menarik kesimpulan dari hasil analisis, yaitu

Kesimpulan dari Hasil Analisis Efisiensi

Usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan sudah efisien dengan tingkat persentase kinerja keuangannya antara 60% - 80%. Sebaliknya dikatakan tidak efisien jika persentase kinerja keuangannya berada diatas 100%.

Kesimpulan dari Hasil Analisis Efektivitas

Usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan sudah efektif, dengan tingkat persentase kinerja keuangannya antara >90% - 100%. Sebaliknya dikatakan tidak efektif jika persentase kinerja keuangannya berada dibawah dari 60%.

Dari langkah-langkah analisis diatas, maka dapat menentukan varians, tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas daerah tahun anggaran 2007 di Kabupaten Magetan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kabupaten Magetan

Akar sejarah Kabupaten Magetan dimulai dari Kehadiran Kerabat Kraton Mataram yang sedang dalam pengasingan yaitu Basah Gondokusumo bersama neneknya Basah Soeryoningrat di daerah timur lereng Gunung Lawu, setelah mendengar didaerah tersebut sedang dilakukan babat hutan. Babat hutan dilakukan oleh seorang yang bernama Buyut Suro yang kemudian bergelar Ki Ageng Getas. Pelaksanaan babat hutan tersebut atas perintah dari Ki Ageng Getas, dan bermaksud ingin mendapatkan sebidang tanah untuk bermukim. Oleh Ki Ageng Getas disampaikan bahwa untuk mendapatkan sebidang tanah untuk bermukim harus mendapat ijin dari Ki Ageng Mageti di kediamannya di Dukuh Gandong Kidul.

Setelah melalui perdebatan yang sangat sengit antara Ki Ageng Mageti dengan Basah Soeryoningrat, yang kemudian Ki Ageng Mageti mengetahui bahwa Basah Soeryoningrat adalah kerabat Keraton Mataram bahkan juga sesepuh Mataram yang membutuhkan pengayoman maka sebagai bukti kesetiaan kepada Mataram, Ki Ageng Mageti menyerahkan semua tanahnya dan Basah Soeryoningrat tinggal menempati sebidang tanah di sebelah utara Sungai Gandong.

Setelah mendapatkan tempat tinggal untuk bermukim Basah Soeryoningrat mewisuda Cucu beliau Basah Gondokusumo menjadi penguasa

di tempat baru tersebut dan bergelar YOSONEGORO yang kemudian dikenal sebagai BUPATI YOSONEGORO. Atas jasa Ki Ageng Mageti, Basah Soeryoningrat dan Basah Gondokusumo (Yosonegoro) merasa berbesar hati karena mendapatkan wilayah yang cukup luas dan strategis. Atas jasa tersebut diberilah nama tanah baru tersebut dengan nama MAGETAN. Magetan berasal dari kata MAGETI yang mengalami perubahan MAGETI – MAGETIAN – MAGETYAN – MAGETAN. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1675 yang sesuai perhitungan tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1675 masehi, yang kemudian diberi peringatan dengan warsa sangkala: MANUNGGALING ROSO ROSO SUKO AMBANGUN (Sejarah Kabupaten Magetan).

B. Lokasi, Tanah dan Iklim

Magetan merupakan Kabupaten yang terletak di ujung barat Propinsi Jawa Timur, dan berada pada ketinggian antara 60 sampai dengan 1660 meter diatas permukaan laut. Magetan berbatasan langsung dengan propinsi Jawa Tengah, tepatnya di sebelah selatan dengan Kabupaten Wonogiri dan di sebelah barat dengan Kabupaten Karanganyar. Selain dengan kedua kabupaten tersebut, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Madiun di sebelah timur dan sebelah selatan berbatasan juga dengan Kabupaten Ponorogo.

Magetan merupakan kabupaten terkecil ke dua se Jawa Timur setelah Sidoarjo, dengan luas seluruh Kabupaten Magetan 688,85 km². Plaosan merupakan kecamatan terluas dengan luas 94,43 Km², sedang Karangrejo dengan luas seluruh 15,15 Km² merupakan kecamatan dengan luas terkecil.

Dengan 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan, berarti rata-rata luas tiap kecamatan sebesar 40,52 Km². Jarak antar ibu kota kecamatan yang tidak terlalu jauh merupakan salah satu faktor yang menguntungkan untuk melaksanakan pembangunan. Jarak terpendek adalah Kecamatan Poncol-Plaosan yang berjarak 3,4 Km dan jarak terjauh Parang - Kartoharjo sejauh 41 Km. Sedang jarak terpendek dari ibukota kabupaten ke kecamatan, adalah dengan Kecamatan Magetan sejauh 2 km dan jarak terjauh adalah dengan Kecamatan Kartoharjo dengan jarak 26 Km.

Terletak sekitar 7° 38' 30" lintang selatan dan 111° 20' 30" bujur timur, dengan suhu udara berkisar antara 16-20° C di daerah pegunungan dan 22-26° C di dataran rendah. Magetan merupakan kabupaten yang berpotensi di bidang pertanian dan pariwisata. Curah hujan yang turun mencapai 1.481-2.345 mm per tahun di dataran tinggi dan 876-1551 mm per tahun di dataran rendah.

C. Pemerintahan

Kabupaten Magetan terbagi dalam 235 desa/kelurahan, 1.045 RW dan 4.691 RT. Berdasarkan klasifikasinya, seluruh desa/kelurahan yang merupakan satuan terendah dari pemerintah, pada tahun 2007 diberikan Alokasi Dana Desa atau Anggaran Kelurahan sebesar Rp. 23.915.000,00,- yang dialokasikan sebagai dana penguatan sistem pemerintahan desa atau kelurahan, pemberdayaan manusia, usaha dan lingkungan serta biaya operasional dana penunjang kegiatan PKK, pembinaan anak dan remaja.

D. Kependudukan

Pada akhir tahun 2006 jumlah penduduk Kabupaten Magetan sebanyak 692.248 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2007 yang sebanyak 693.274 jiwa, maka tingkat pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu satu tahun adalah 0,15 persen

Kecamatan Magetan adalah Kecamatan yang daerahnya memiliki penduduk yang paling padat yaitu 2.08 jiwa per km², sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Poncol dengan kepadatan 582 jiwa per km². Berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk laki-laki berjumlah 335.292 jiwa dan perempuan sebanyak 357.982 jiwa, sedangkan sek rasio dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, hal ini berarti bahwa pertumbuhan penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki.

Warga Negara Asing yang menjadi penduduk Kabupaten Magetan berasal dari Cina sebanyak 5 jiwa, menghuni di 5 rumahtangga dengan rata-rata anggota rumahtangga 1,0. Populasi penduduk akhir tahun menurut kelompok umur yang disajikan pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa interval 15-19 tahun memiliki jumlah paling besar dibanding kelompok umur yang lain yaitu sebesar 65.071 jiwa atau 9,37 persen dari total penduduk. Kelompok umur ini adalah kelompok usia sekolah tingkat SLTA, oleh karena itu penyediaan sarana pendidikan baik SMU maupun SMK sangat dibutuhkan. Disamping itu penyediaan lapangan kerja khususnya di wilayah pedesaan juga diperlukan, karena pada kelompok usia ini untuk masyarakat desa sudah mulai bekerja.

Jumlah pekerja menurut lapangan usaha hingga tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah pekerja di sektor pertanian masih mendominasi (63,28 persen) dari total pekerja. Sektor lain yang juga cukup besar ditekuni oleh 61.770 pekerja adalah sektor perdagangan, hotel dan rumah makan. Sedangkan sektor jasa sosial kemasyarakatan menempati urutan ke tiga yaitu sebesar 41.326 jumlah pekerja.

Tabel 4.1
Penduduk Akhir Tahun Menurut Kelompok Umur
2007

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	22.145	21.793	43.938
2	5-9	22.667	22.089	44.756
3	10-14	24.686	23.650	48.336
4	15-19	27.587	26.530	54.117
5	20-24	34.060	31.011	65.071
6	25-29	27.440	25.335	52.775
7	30-34	21.671	22.997	44.668
8	35-39	21.965	25.276	47.241
9	40-44	23.376	27.136	50.512
10	45-49	24.007	27.386	51.393
11	50-54	22.863	24.065	46.928
12	55-59	18.535	19.601	38.136
13	60-64	14.284	15.869	30.153
14	65-69	11.618	14.841	26.459
15	70-74	8.472	13.802	22.274
16	75keatas	9.916	16.601	26.517
	Jumlah/Total	335.292	357.982	693.274
	2006	334.722	357.526	692.248
	2005	334.177	357.008	691.185
	2004	333.172	356.273	689.445
	2003	332.352	355.421	687.773
	2002	331.314	354.468	685.782

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan

E. Sosial

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terlepas dari ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai. Jumlah tenaga kesehatan tahun 2007 sebanyak 809 orang, yang terdiri dari dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya.

Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2006 sebanyak 130.737 PUS, turun 2,44 persen menjadi 127.544 PUS pada tahun 2007. Penurunan juga terjadi pada jumlah PUS yang memakai alat kontrasepsi menjadi 95.048 pemakai atau turun sebesar 5,17 persen dibanding tahun 2006.

Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I mengalami penurunan, dari 63.704 keluarga pada tahun 2006 menjadi 58.034 keluarga pada tahun 2007. Berdasarkan tahapan Keluarga Sejahtera (KS) maka KS III menduduki peringkat terbesar dengan jumlah sebanyak 64.351 keluarga, atau 32,63 persen dari total 197.240 keluarga di Kabupaten Magetan

Partisipasi sekolah penduduk hendaknya diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Tabel 4.2 sampai dengan Tabel 4.12 memberikan gambaran mengenai jumlah sekolah, murid dan guru pada tahun ajaran 2007/2008.

Tabel 4.2
Sekolah, Gedung, Kelas, Murid dan Guru Menurut Tingkat/Jenis Sekolah
2007/2008

Jenis/ Tingkat Sekolah	Sekolah		Gedung			Jumlah			
	Negeri	Swasta	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	Jumlah	Kelas	Murid Negeri	Murid Swasta	Guru
1. TK	2	397	428	160	588	562	44	9.365	649
2. SD	496	8	3.270	31	3.301	3.158	49.918	1.131	4990
3. SMP	38	15	682	8	690	629	22.343	1.185	1.845
4. SMU	10	2	220	-	220	213	8.222	737	670
5. SMK	6	22	292	7	299	267	3.205	5.739	837

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan

Tabel 4.3
Banyaknya Lulusan Sekolah
2005/2006-2006/2007

Jenis Sekolah	Banyaknya Sekolah		Banyaknya Peserta Ujian		Banyaknya Peserta Ujian yang Lulus	
	2005/ 2006	2006/ 2007	2005/ 2006	2006/ 2007	2005/ 2006	2006/ 2007
I. SD						
1. Negeri/Inpres	498	496	8.358	8.546	8.353	8.544
2. Swasta	8	8	97	489	97	489
II. Pendidikan Umum						
1. SMP Negeri	38	38	7.968	7.517	7.648	7.486
2. SMP Swasta	16	16	479	461	471	449
3. SMU Negeri	10	10	2.454	2.490	2.449	2.472
4. SMU Swasta	2	2	399	293	398	292
III. Pendidikan Kejuruan						
1. SMK Negeri	5	5	689	702	698	702
2. SMK Swasta	22	22	2.431	1.922	2.416	1.887

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan

Tabel 4.4
Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-kanak
2007/2008

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Ruang Belajar	Jumlah Kelas	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1. Poncol	18	18	19	295	17
2. Parang	24	33	33	584	28
3. Lembeyan	27	26	48	445	22
4. Takeran	25	34	40	614	50
5. Nguntoronadi	12	17	17	321	25
6. Kawedanan	28	40	55	458	39
7. Magetan	30	85	27	1.510	107
8. Ngariboyo	23	35	29	509	36
9. Plaosan	40	67	66	1.009	41
10. Sidorejo	7	7	7	144	14
11. Panekan	30	44	37	605	34
12. Sukomoro	18	20	20	288	23
13. Bendo	23	23	23	408	20
14. Maospati	25	49	41	720	66
15. Karangrejo	17	31	26	389	38
16. Karas	18	18	26	359	22
17. Barat	18	27	27	452	44
18. Kartoharjo	16	14	21	299	23
Jumlah	399	588	562	9.409	649
2006/2007	384	526	519	10.614	650
2005/2006	382	507	481	10.726	601
2004/2005	366	536	472	9.464	578
2003/2004	382	452	522	9.403	685
2002/2003	356	402	994	8.827	631

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan

Tabel 4.5
Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar
2007/2008

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Ruang Belajar	Jumlah Kelas	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1. Poncol	24	138	144	2.373	230
2. Parang	39	249	228	3.232	356
3. Lembeyan	33	206	198	2.380	327
4. Takeran	25	182	150	1.907	290
5. Nguntoronadi	16	120	95	1.410	186
6. Kawedanan	30	204	192	3.893	344
7. Magetan	32	205	208	4.468	355
8. Ngariboyo	26	173	258	2.884	253
9. Plaosan	40	240	240	4.255	335
10. Sidorejo	20	122	122	2.271	185
11. Panekan	38	238	226	4.262	347
12. Sukomoro	26	179	158	2.395	256
13. Bendo	33	226	198	2.822	347
14. Maospati	38	240	204	3.872	360
15. Karangrejo	20	145	129	2.193	208
16. Karas	21	144	132	2.168	199
17. Barat	23	159	150	2.419	222
18. Kartoharjo	20	131	126	1.845	190
Jumlah	504	3.301	3.158	51.049	4.990
2006/2007	503	3.116	3.048	51.581	4.108
2005/2006	504	3.235	3.053	52.189	4.267
2004/2005	499	3.199	3.050	52.942	4.109
2003/2004	499	3.405	3.050	54.711	4.580
2002/2003	524	3.317	3.210	55.153	4573

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan

Tabel 4.6
Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama
2007/2008

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Ruang Belajar	Jumlah Kelas	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1. Poncol	2	20	20	698	54
2. Parang	4	50	45	1.745	123
3. Lembeyan	3	28	25	956	77
4. Takeran	2	17	19	595	58
5. Nguntoronadi	1	17	15	603	40
6. Kawedanan	4	60	60	2.092	192
7. Magetan	7	99	88	3.440	239
8. Ngariboyo	2	19	22	246	62
9. Plaosan	5	59	51	2.036	148
10. Sidorejo	2	18	19	568	49
11. Panekan	4	49	36	1.237	104
12. Sukomoro	2	43	30	979	94
13. Bendo	2	30	22	749	72
14. Maospati	6	63	64	2.537	205
15. Karangrejo	2	36	36	1537	104
16. Karas	2	25	23	861	68
17. Barat	2	39	36	1.476	104
18. Kartoharjo	1	18	18	573	52
Jumlah	53	690	629	23.528	1.845
2006/2007	55	682	644	23.886	1.759
2005/2006	54	723	625	24.367	1.778
2004/2005	53	720	632	24.081	1.814
2003/2004	53	701	616	25.328	1.802
2002/2003	55	690	651	26.085	1.827

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan

Tabel 4.7
Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan
2007/2008

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Ruang Belajar	Jumlah Kelas	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1. Poncol	1	7	4	-	9
2. Parang	2	19	18	690	64
3. Lembeyan	1	3	3	68	17
4. Takeran	3	42	19	710	81
5. Nguntoronadi	-	-	-	-	-
6. Kawedanan	6	41	48	1.699	170
7. Magetan	11	186	176	6.724	474
8. Ngariboyo	2	15	15	472	58
9. Plaosan	1	15	15	604	46
10. Sidorejo	1	21	21	889	54
11. Panekan	1	3	3	52	22
12. Sukomoro	1	13	13	602	43
13. Bendo	1	20	25	757	63
14. Maospati	6	80	72	2.746	258
15. Karangrejo	-	-	-	-	-
16. Karas	1	18	17	728	59
17. Barat	1	17	18	781	54
18. Kartoharjo	1	9	10	354	35
Jumlah	40	509	477	17.876	1.507
2006/2007	39	495	456	17.349	1.425
2005/2006	39	520	459	17.264	1.326
2004/2005	38	489	467	18.220	1.342
2003/2004	38	502	483	19.449	1.328
2002/2003	38	497	534	19.786	1.408

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan

Tabel 4.8
Sekolah, Kelas, Murid dan Guru di bawah Non Dikmas Menurut Tingkat dan Status Sekolah

Jenis/ Tingkat Sekolah	Jumlah Sekolah	Ruang Belajar	Jumlah Kelas	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1. Madrasah Diniyah	210	-	-	13.301	1.886
- Negeri	-	-	-	-	-
- Filial	-	-	-	-	-
- Swasta	210	-	-	13.301	1.886
2. Madrasah	71	417	445	3.626	821
- Negeri	16	104	109	1.500	600
- Filial	-	-	-	-	-
- Swasta	55	313	336	2.126	221
3. Madrasah	32	205	201	6.213	699
- Negeri	10	102	102	3.213	300
- Filial	-	-	-	-	-
- Swasta	22	103	99	3000	399
4. Madrasah	12	882	49	3.317	361
- Negeri	3	619	34	1.500	200
- Filial	-	-	-	-	-
- Swasta	9	263	15	1.817	161

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Magetan

Tabel 4.9
Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Diniyah
2007/2008

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1. Poncol	9	481	127
2. Parang	17	1.050	149
3. Lembeyan	12	803	107
4. Takeran	13	1.434	166
5. Nguntoronadi	5	108	26
6. Kawedanan	7	270	44
7. Magetan	3	133	22
8. Ngariboyo	4	412	30
9. Plaosan	12	528	53
10. Panekan	21	1.539	263
11. Sukomoro	3	142	39
12. Bendo	15	738	79
13. Maospati	14	1.162	86
14. Karangrejo	13	533	71
15. Karas	12	1.173	319
16. Barat	30	1.595	129
17. Kartoharjo	20	1.200	176
Jumlah	210	13.301	1.886
2006/2007	170	10.622	1.511
2005/2006	167	11.053	1.189
2004/2005	167	11.053	1.189
2003/2004	158	11.732	360
2002/2003	220	15.988	1.844

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Magetan

Tabel 4.10
Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Ibtidaiyah
2007/2008

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1. Poncol	4	293	42
2. Parang	7	405	51
3. Lembeyan	9	653	100
4. Takeran	7	1.063	124
5. Nguntoronadi	2	309	23
6. Kawedanan	1	77	7
7. Magetan	1	292	18
8. Ngariboyo	4	374	21
9. Plaosan	4	193	35
10. Sidorejo	1	124	15
11. Panekan	8	408	83
12. Sukomoro	1	166	19
13. Bendo	5	450	60
14. Maospati	1	124	15
15. Karangrejo	2	103	26
16. Karas	8	1.130	111
17. Barat	2	230	26
18. Kartoharjo	4	232	45
Jumlah	71	6.626	821
2006/2007	71	6.744	402
2005/2006	71	6.545	495
2004/2005	71	6.708	367
2003/2004	71	6.483	396
2002/2003	71	6.456	424

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Magetan

Tabel 4.11
Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Tsanawiyah
2007/2008

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1. Poncol	4	752	76
2. Parang	3	527	98
3. Lembeyan	3	243	54
4. Takeran	3	693	64
5. Nguntoronadi	-	-	-
6. Kawedanan	1	40	23
7. Magetan	1	93	15
8. Ngariboyo	1	112	10
9. Plaosan	4	295	50
10. Sidorejo	1	193	24
11. Panekan	1	692	29
12. Sukomoro	1	72	13
13. Bendo	2	172	31
14. Maospati	-	-	-
15. Karangrejo	1	405	26
16. Karas	3	1.438	124
17. Barat	2	405	24
18. Kartoharjo	1	81	23
Jumlah	32	6.213	684
2006/2007	32	6.062	199
2005/2006	33	5.811	189
2004/2005	32	5.800	173
2003/2004	33	5.539	179
2002/2003	32	5.440	187

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Magetan

Tabel 4.12
Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Aliyah
2007/2008

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1. Poncol	1	45	76
2. Parang	-	-	11
3. Lembeyan	1	114	-
4. Takeran	1	241	18
5. Nguntoronadi	-	-	42
6. Kawedanan	-	-	-
7. Magetan	2	263	-
8. Ngariboyo	1	111	68
9. Plaosan	1	56	19
10. Sidorejo	-	-	13
11. Panekan	1	244	-
12. Sukomoro	-	-	46
13. Bendo	1	-	27
14. Maospati	-	63	-
15. Karangrejo	1	-	27
16. Karas	2	125	67
17. Barat	-	993	-
18. Kartoharjo	1	-	23
Jumlah	13	2.317	361
2006/2007	13	2.077	323
2005/2006	12	1.845	50
2004/2005	11	2.107	45
2003/2004	11	1.700	49
2002/2003	12	1.748	52

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Magetan

F. Pertanian

Luas wilayah Magetan 68.884 ha, terbagi atas 28.397 hektar tanah sawah dan 40.488 hektar tanah kering. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Magetan, karena sebagian besar penduduk Magetan hidup dari bercocok tanam. Komoditas tanaman bahan makanan, utamanya padi masih merupakan produk yang besar peranannya bagi masyarakat Magetan.

Tahun 2007 terjadi penurunan produksi padi. Produksi padi tahun 2006 sebesar 220.184 ton, turun 0,20 persen menjadi 219.736 ton pada tahun 2007. Penurunan produksi padi tahun 2007 diikuti oleh menurunnya produksi jagung, kedelai, dan kacang hijau. Tetapi untuk produksi ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah tahun 2007 terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2006 masing-masing sebesar 7,60 persen, 57,88 persen dan 5,36 persen.

Tiga jenis buah-buahan yang banyak dihasilkan Jeruk Besar (315.505 kw), Pisang (93.362 kw) dan Mangga (74.062 kw). Empat jenis buah-buahan yang mengalami peningkatan produksi yang signifikan pada tahun 2007 adalah Semangka/Melon (71,80 persen), Sawo (48,07 persen) dan Jeruk Keprok (42,67 persen). Sementara sayur-sayuran yang banyak diproduksi adalah kubis (139.037 kw), bawang merah (88.731 kw), wortel (52.863 kw) dan kentang (51.444 kw).

Pada hampir semua jenis ternak baik, ternak besar, ternak kecil dan unggas mengalami peningkatan jumlah populasi pada tahun 2007 dibanding tahun sebelumnya, dengan kisaran 0,35 persen hingga 14,29 persen.

Sedangkan jumlah populasi kelinci dan ayam petelur turun masing-masing sebesar 1,62 persen dan 2,91 persen.

G. Industri

Profil industri pengolahan di Kabupaten Magetan hingga tahun 2007 masih didominasi oleh industri kecil. Jumlah industri kecil bertambah 32 unit sehingga menjadi 439 unit pada tahun 2007. Beberapa jenis industri yang memberikan andil cukup besar bagi perindustrian di Kabupaten Magetan adalah industri penyamakan kulit menghasilkan Rp. 60.066 juta, genteng Rp 31.848 juta, anyaman bambu sebesar Rp. 22.539 juta, emping melinjo Rp. 10.434 juta, pande besi sebesar Rp. 9.788 juta dan batu bata merah menghasilkan Rp 9.646 juta.

H. Air dan Listrik

Jumlah pelanggan dan besarnya air yang disalurkan, yang secara langsung akan bisa diketahui konsumsi air bersih masyarakat Magetan. Besarnya persentase masyarakat mengkonsumsi air bersih dapat dijadikan salah satu penilaian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, atau dengan kata lain ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dicerminkan dari rata-rata konsumsi air bersih oleh masyarakat. Jumlah produksi air bersih PDAM Magetan tahun 2007 sebesar 9.275.370 M³, sedangkan jumlah pelanggan 42.551, sehingga konsumsi air bersih per pelanggan per tahun adalah 217,98 M³. Nilai ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata konsumsi air bersih di Jawa Timur yang hampir mencapai angka 300 M³ per pelanggan per tahun. Hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Magetan

sebagian besar pedesaan, masyarakat pedesaan masih memiliki air bersih yang melimpah untuk kegiatan sehari-hari sehingga keadaan ini berpengaruh terhadap besar kecilnya pembelian air bersih yang dikelola PDAM.

Penyediaan listrik yang memadai sebagai komoditas vital sangat diperlukan. Dari data dapat dicermati bahwa pada komponen daya terpasang, jumlah pelanggan dan nilai penjualan mengalami peningkatan pada tahun 2007 dibanding tahun 2006. Produksi listrik yang didistribusikan dari ranting Magetan naik sebesar 6,22 persen, dan dari ranting Maospati naik 8,08 persen. Pelanggan menurut golongan tarip terbanyak berasal dari rumah tangga, mendominasi 96,40 persen dari seluruh pelanggan yang ada di Kabupaten Magetan.

I. Perdagangan

Bentuk perusahaan yang terdaftar pada tahun 2007 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dengan penambahan jumlah usaha sebanyak 155 usaha (3,57 persen). Perusahaan perorangan tumbuh cukup besar yaitu bertambah sebanyak 116 usaha atau meningkat 3,06 persen. Kondisi ini diharapkan mampu mengangkat ekonomi rakyat Magetan, sehingga produktifitas dan pendapatan masyarakat semakin membaik.

J. Perhotelan

Upaya penyediaan akomodasi beserta fasilitas dan pelayanannya perlu terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan khususnya kepariwisataan di Kabupaten Magetan. Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Magetan tahun 2007 sebanyak 68 hotel, terbagi dalam tiga klasifikasi yaitu Hotel Bintang sebanyak 2 hotel, Hotel Melati sebanyak 54 hotel dan 12 pondok Wisata dari 68 hotel yang ada di Magetan, sebanyak 61 hotel berlokasi di Kecamatan Maospati.

Banyaknya pengunjung yang datang ke tempat wisata menunjukkan pada tahun 2007, pengunjung ke Telaga Sarangan, Puncak Lawu, bumi perkemahan dan air terjun masih cukup banyak.

K. Perhubungan

Jumlah kendaraan bermotor penumpang dan barang yang melakukan wajib uji pada tahun 2007 mencapai angka 956 kendaraan umum wajib uji. Sementara itu jumlah kendaraan bermotor bukan umum meningkat dari tahun 2002 sampai tahun 2006, namun pada tahun 2007 terjadi penurunan sebanyak 4 unit kendaraan bila dibandingkan dengan tahun 2006.

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan perekonomian dan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Magetan mencapai 567,603 km yang terbagi atas jalan negara sepanjang 525,810 km dan tidak ada jalan dengan permukaan tanah.

Sarana Pos dan Telekomunikasi semakin berperan penting untuk memperlancar segala aktivitas, baik aktivitas yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Berkenaan dengan semakin meningkatnya permintaan akan jasa telekomunikasi maka jumlah pelanggan telepon terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun di hampir semua unit pelayanan, sehingga secara total bertambah 196 pelanggan, yaitu dari jumlah pelanggan tahun 2006 sebesar 15.512 naik menjadi 15.708 pelanggan pada akhir tahun 2007.

L. Keuangan

Pemerintah Kabupaten Magetan senantiasa berusaha meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, karena penggerak utama jalannya roda pemerintahan dan pembangunan adalah dana yang memadai. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB baik yang berasal dari pedesaan, perkotaan dan pertambangan mengalami peningkatan pada tahun 2007 dibanding tahun sebelumnya, dengan total penerimaan PBB tahun 2007 sebesar Rp. 24,816 milyar atau naik sebesar Rp. 2,068 milyar (11,4 persen).

Dana pihak ke III dan besar pinjaman pada bank-bank di Kabupaten Magetan pada tahun 2007 turun 1,67 persen dibandingkan tahun 2006, Posisi kredit rupiah menurut jenis penggunaan tahun 2007 bila dibandingkan dengan tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 1,90 persen. Penggunaan kredit pada tahun 2007 terbesar pada kredit modal kerja sebesar 61,93 persen.

Data perkembangan harga setiap bulan dari sembilan bahan pokok dan kebutuhan penting lainnya, terlihat bahwa pada akhir tahun 2007 hampir semua komoditi mengalami kenaikan harga kecuali kacang tanah, tepung terigu dan ubi kayu.

M. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk mengukur tingkat pendapatan atau produktivitas masyarakat Magetan dalam jangka waktu tertentu, dari sisi harga disajikan dalam dua bentuk yaitu PDRB atas dasar berlaku dimana jumlah nilai tambah yang diukur/dinilai dengan berdasarkan tahun berproduksi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan, nilai tambah diukur atas dasar harga tahun 2000.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah bruto yang tidak dipengaruhi oleh faktor inflasi tetapi hanya dipengaruhi oleh kuantum atau jumlah produksi. PDRB atas dasar harga berlaku mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 berturut-turut adalah 3.281,19 milyar, 3.902,66 milyar dan 4.485,21 milyar. Sektor yang paling besar sumbangannya terhadap totalitas nilai PDRB adalah sektor Pertanian, menyusul sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, selanjutnya sektor Jasa-jasa dan distribusi yang paling kecil adalah sektor Pertambangan dan Penggalian.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting, karena angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan produktivitas riil baik sumber daya manusia maupun alam Kabupaten Magetan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 berturut-turut adalah 4,16 persen, 4,81 persen dan 5,12 persen, sedangkan laju inflasi berturut-turut 6,89 persen, 13,48 persen dan 9,33 persen.

BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data yang dimaksud dalam penelitian adalah Laporan Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2007.

Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD.

Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2007:

Tabel 5.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2007
(Rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN 2007	REALISASI 2007	%
A	PENDAPATAN	581.489.446.000,00	596.054.820.134,84	102,50
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	33.960.183.000,00	37.100.922.507,84	109,25

Tabel Lanjutan

Tabel 5.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2007
(Rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN 2007	REALISASI 2007	%
1.a	Pajak Daerah	5.233.500.000,00	5.490.294.407,85	104,91
1.b	Retribusi Daerah	21.014.245.000,00	21.217.877.289,00	100,97
1.c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	240.938.000	697.379.143,66	289,44
1.d	Lain-lain PAD Yang Sah	7.471.500.000,00	9.695.371.667,33	129,76
2	PENDAPATAN TRANSFER	545.529.263.000,00	555.953.897.627,00	101,91
2.a	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	521.894.495.000,00	527.038.521.935,00	100,99
-	Dana Bagi Hasil Pajak	22.448.615.000,00	28.458.650.160,00	126,77
-	Dana Bagi Hasil Sumber Dana Alam	1.988.880.000,00	1.624.571.775,00	81,68
-	Dana Alokasi Umum	451.962.000.000,00	451.962.000.000,00	100,00
-	Dana Alokasi Khusus	45.495.000.000,00	44.993.300.000,00	98,90
2.b	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	300.000.000,00	4.914.933.874,00	1.638,31
-	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
-	Dana Penyesuaian	300.000.000,00	4.914.933.874,00	1.638,31
2.c	Transfer Pemerintah Propinsi	23.334.768.000,00	24.000.441.818,00	102,85
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.304.768.000,00	23.970.441.818,00	102,86
-	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	150,00

Tabel Lanjutan

Tabel 5.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2007
(Rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN 2007	REALISASI 2007	%
3.a	Pendapatan Hibah	-	-	-
3.b	Pendapatan Dana Darurat	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	150,00
3.c	Pendapatan Lainnya	-	-	-
B	BELANJA	626.378.888.109,12	566.426.072.979,56	90,43
1	BELANJA OPERASI	440.456.774.165,18	399.366.849.558,56	90,67
1.a	Belanja Pegawai	352.557.633.443,00	326.309.370.833,25	92,55
1.b	Belanja Barang dan Jasa	78.484.042.222,18	66.297.263.250,42	84,47
1.c	Belanja Bunga	42.841.000,00	42.834.744,89	99,99
1.d	Belanja Subsidi	-	-	-
1.e	Belanja Hibah	-	-	-
1.f	Belanja Bantuan Sosial	9.372.257.500,00	6.717.380.730,00	71,67
2	BELANJA MODAL	146.883.877.865,00	132.632.389.185,00	90,30
2.a	Tanah	6.943.335.000,00	3.589.309.500,00	51,69
2.b	Peralatan dan Mesin	26.255.074.050,00	24.786.029.647,00	94,40
2.c	Gedung dan Bangunan	50.135.357.415,00	44.916.778.500,00	89,59
2.d	Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.113.247.200,00	57.615.454.438,00	94,28
2.e	Aset Tetap Lainnya	2.436.864.200,00	1.724.817.100,00	70,78
2.f	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-

Tabel Lanjutan

Tabel 5.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2007
(Rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN 2007	REALISASI 2007	%
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.271.618.078,94	143.101.000,00	11,25
3.a	Belanja Tidak Terduga	1.271.618.078,94	143.101.000,00	11,25
4	TRANSFER	37.766.618.000,00	34.283.733.236,00	90,78
4.a	Transfer / Bagi Hasil ke Desa	-	-	-
-	Bagi Hasil Pajak	-	-	-
-	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-
-	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	581.489.466.000,00	596.054.820.134,84	102,50
	JUMLAH BELANJA	626.378.888.109,12	566.426.072.979,56	90,43
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.889.442.109,12)	29.628.747.155,28	(66,00)
C	PEMBIAYAAN			
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	64.143.792.109,12	65.624.571.034,12	102,31
1.a	Penggunaan Silpa	57.135.060.109,12	57.135.060.109,12	100,00
1.b	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-

Tabel Lanjutan

Tabel 5.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2007
(Rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN 2007	REALISASI 2007	%
1.c	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.008.732.000	8.489.510.925,00	100,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.254.350.000,00	15.050.563.072,74	78,17
2.a	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
2.b	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.143.750.000,00	8.940.000.000,00	68,02
2.c	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	110.600.000,00	110.563.072,74	99,97
	PEMBIAYAAN NETO	44.889.442.109,12	50.574.007.961,38	112,66
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	80.202.755.116,66	(89,33)

B. Penjelasan Pos Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2007**1. Pendapatan Daerah Rp 596.054.820.134,84**

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Adapun sumber dana Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 berasal

dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer dari Pemerintah Pusat
Maupun Pemerintah Propinsi serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 37.100.922.507,84

PAD merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2006. Adapun sumber dana PAD berasal dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2007

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pajak Daerah	5.233.500.000,00	5.490.294.407,85	104,91
-	Pajak Hotel	120.000.000,00	113.000.000,00	94,85
-	Pajak Restoran	18.500.000,00	14.335.000,00	77,49
-	Pajak Hiburan	25.000.000,00	12.767.500,00	41,07
-	Pajak Reklame	100.000.000,00	113.763.802,50	113,76
-	Pajak Penerangan Jalan	4.920.000.000,00	5.117.534.732,30	104,01
-	Pajak Galian Golongan C	50.000.000,00	118.115.023,05	236,23
2	Retribusi Daerah	21.014.245.000,00	21.217.877.289,00	106,01
-	Retribusi Pelayanan Pasar	1.627.080.000,00	1.697.970.500,00	104,35
-	Retribusi Pelayanan Administrasi	169.500.000,00	231.661.073,00	136,67
-	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	14.365.839.000,00	14.067.147.360,00	97,92

Tabel Lanjutan

Tabel 5.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2007

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
-	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinkes (Pelayan & Perijinan Kesehatan)	995.450.000,00	1.023.941.950,00	102,86
-	Retribusi Ijin Tata Usaha Hutan	37.000.000,00	57.460.275,00	155,30
-	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	59.000.000,00	59.000.3000,00	100,00
-	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Benih Perikanan)	21.000.000,00	21.002.000,00	100,00
-	Retribusi Persampahan / Kebersihan: (Sampah, Alat berat & Laboratorium & Sewa Tanah, Kakus, IMB)	358.620.000,00	420.443.326,00	117,24
-	Retribusi Obyek Wisata: (Parkir Umum & Khusus, Uji Kendaraan, Terminal, Rekreasi & Olah Raga, Izin Trayek)	2.219.000.000,00	2.291.796.960,00	103,55
-	Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil: (KTP, KSK, Akte Kelahiran)	1.043.756.000,00	1.164.043.200,00	111,52
-	Retribusi Ijin Usaha: (Industri & Perdagangan)	30.000.000,00	27.500.000,00	91,67
-	Retribusi Ijin Gangguan	75.000.000,00	89.350.000,00	119,13
-	Retribusi Usaha Pertanian	13.000.000,00	66.560.355,00	512,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	740.938.000,00	697.379.143,66	94,12
-	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD: (Bank & BPR Jatim)	240.938.000,00	240.938.793,66	100,00

Tabel Lanjutan

Tabel 5.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2007

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
-	Laba Usaha Sapi Kereman	500.000.000,00	456.440.350,00	91,29
4	Lain-Lain PAD yang Sah	6.971.500.000,00	9.695.371.667,33	129,76
-	Hasil Penjualan Aset yang tidak terpisahkan (Drum Bekas)	24.500.000,00	38.937.700,00	158,93
-	Penerimaan Jasa Giro: (Jasa Giro & KEK)	4.265.000.000,00	6.029.778.683,33	141,38
-	Pengembalian dari Penerimaan Lainnya	2.682.000.000,00	3.626.655.284,00	135,22
	Jumlah	33.960.183.000,00	37.100.922.507,84	109,25

b. Pendapatan Transfer Rp 555.953.897.627,00

Sumber dana Pendapatan Transfer merupakan dana yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi, yang terdiri dari: Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya), Transfer Pemerintah Propinsi, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2007

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	521.894.495.000,00	527.038.521.935,00	100,99
Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)	300.000.000,00	4.914.933.874,00	1.638,31
Transfer Pemerintah Propinsi	23.334.768.000,00	24.000.441.818,00	102,85
Jumlah	545.529.263.000,00	555.953.897.627,00	101,91

1) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) Rp 527.038.521.935,00

Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) adalah merupakan sumber dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang sangat diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 5.4
Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)
Tahun Anggaran 2007

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Dana Bagi Hasil Pajak	22.448.615.000,00	28.458.650.160,00	126,77
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.988.880.000,00	1.624.571.775,00	81,68
Dana Alokasi Umum	451.962.000.000,00	451.962.000.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	45.495.000.000,00	44.993.300.000,00	98,90
Jumlah	521.894.495.000,00	527.038.521.935,00	100,99

2) **Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya) Rp 4.914.933.874,00**

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2007 untuk Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya) telah ditetapkan target sebesar Rp 300.000.000,00. Adapun untuk realisasinya sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 4.914.933.874,00 sehingga realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 4.614.933.874,00 atau mencapai 1.638,31%. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya) berasal dari pendapatan: Kompensasi Pajak Penghasilan (PPh 21) sebesar Rp 597.524.674,00 dan Dana Tunjangan Kependidikan tahun 2007 sebesar Rp 4.317.409.200,00

3) **Transfer Pemerintah Propinsi Rp 24.000.441.818,00**

Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten menerima pendapatan bagi hasil pajak yang merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Tabel 5.5
Transfer Pemerintah Propinsi
Tahun Anggaran 2007

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.304.768.000,00	23.970.441.818,00	102,86
Pendapatan bagi Hasil Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Jumlah	23.334.768.000,00	24.000.441.818,00	102,85

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 3.000.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah diperuntukkan untuk dana bantuan penanganan pasca bencana tahun 2007 bidang infrastruktur di Kabupaten Magetan.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Adapun Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Magetan telah dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 5.6
Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Operasi	440.456.774.165,18	399.366.849.558,56	90,67
2	Belanja Modal	146.883.877.865,00	132.632.389.185,00	90,30
3	Belanja Tidak Terduga	1.271.618.078,94	143.101.000,00	11,25
4	Belanja Transfer	37.766.618.000,00	34.283.733.236,00	90,78
	Jumlah	626.378.888.108,12	566.426.072.979,56	90,43

a. Belanja Operasi Rp 399.366.849.558,56

Belanja Operasi dipergunakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemerintahan, Kegiatan Pembangunan/proyek dan Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Belanja Operasi sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 terdiri

dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.7
Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2007

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	352.557.633.443,00	326.309.370.833,25	92,55
Belanja Barang & Jasa	78.484.042.222,18	66.297.263.250,42	84,47
Belanja Bunga	42.841.000,00	42.834.744,89	99,99
Belanja Bantuan Sosial	9.372.257.500,00	6.717.380.730,00	71,67
Jumlah	440.456.774.165,18	399.366.849.558,56	90,67

b. Belanja Modal Rp 132.632.389.185,00

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana, maka Pemerintah Kabupaten Magetan perlu menambah aset tetap. Penambahan aset tetap merupakan Belanja Modal yang telah dituangkan dalam APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2007. Belanja Modal Tahun Anggaran 2007 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.8
Belanja Modal
Tahun Anggaran 2007

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Tanah	6.943.335.000,00	3.589.309.500,00	51,69
Peralatan dan Mesin	26.255.074.050,00	24.786.029.647,00	94,40
Gedung dan Bangunan	50.135.357.415,00	44.916.778.500,00	89,59
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	61.113.247.200,00	57.615.454.438,00	94,28
Aset Tetap Lainnya	2.436.864.200,00	1.724.817.100,00	70,78
Jumlah	146.883.877.865,00	132.632.389.185,00	90,30

c. Belanja Tidak Terduga Rp 143.101.000,00

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

d. Belanja Transfer /Bagi Hasil ke Desa Rp 34.283.733.236,00

Belanja bagi hasil dipergunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah Propinsi kepada pemerintah kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa/kelurahan atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Transfer / Bagi Hasil ke Desa dipergunakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, Kegiatan Pembangunan/proyek dan Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan dan Desa seluruh Kabupaten Magetan yang diarahkan untuk kegiatan-kegiatan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Surplus/Defisit Rp 29.628.747.155,28

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan.

Pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2007 terdapat Surplus sebesar Rp 29.628.747.155,28 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Jumlah Pendapatan Daerah	581489.446.000,00	596.054.820.134,84
- Jumlah Belanja daerah	<u>626.378.888.109,12</u>	<u>566.426.072.979,56</u>
Surplus/(Defisit)	(44.889.442.109,12)	29.628.747.155,28

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pada Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2007 untuk Pembiayaan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 65.624.571.034,12

**Tabel 5.9
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2007**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Penggunaan SiLPA	57.135.060.109,12	57.135.060.109,12	100,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.008.732.000,00	8.489.510.925,00	121,13
Jumlah	64.143.792.109,12	65.624.571.034,12	102,31

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 15.050.563.072,74

**Tabel 5.10
Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2007**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.143.750.000,00	8.940.000.000,00	68,02
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	110.600.000,00	110.563.072,74	99,97
Jumlah	19.254.350.000,00	15.050.563.072,74	78,17

Pembiayaan Neto Rp 50.574.007.961,38

Pembiayaan Neto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Pada tahun anggaran 2007 pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Pembiayaan Neto sebesar Rp 50.574.007.961,38, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan	64.143.792.109,12	65.624.571.034,12
- Pengeluaran Pembiayaan	<u>19.254.350.000,00</u>	<u>15.050.563.072,74</u>
Pembiayaan Neto	44.889.442.109,12	50.574.007.961,38

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2007 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 80.202.755.116,66 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Surplus	29.628.747.155,28
- Pembiayaan Neto	<u>50.574.007.961,38</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	80.202.755.116,66

Tabel 5.11
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
RINGKASAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007
(Rupiah)

No	URAIAN	JUMLAH	
		ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
I	PENDAPATAN		
1	Pendapatan Asli Daerah	33.960.183.000,00	37.100.922.507,84
2	Pendapatan Transfer	545.529.263.000,00	555.953.897.627,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	581.489.446.000,00	596.054.820.134,84
II	BELANJA		
1	Belanja Operasi	440.456.774.165,18	399.366.849.558,56
2	Belanja Modal	146.883.877.865,00	132.632.389.185,00
3	Belanja Tidak Terduga	1.271.618.078,94	143.101.000,00
4	Transfer	37.766.618.000,00	34.283.733.236,00
	JUMLAH BELANJA	626.378.888.109,12	566.426.072.979,56

C. Analisis Data

Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dapat dicapai pada anggaran yang telah dibuat daerah dengan menganalisis perbedaan antara realisasi dengan target yang dianggarkan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sehingga nantinya dapat dihasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi tertentu sesuai dengan kriteria penilaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini penulis hanya melakukan penilaian laporan kinerja keuangan yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

1. Hasil pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berikut langkah-langkah analisis varians:

a) Mengumpulkan data mengenai Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007:

Tabel 5.12
Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Tahun 2007 (Rupiah)

No	URAIAN	JUMLAH	
		ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
I	PENDAPATAN		
1	Pendapatan Asli Daerah	33.960.183.000,00	37.100.922.507,84
2	Pendapatan Transfer	545.529.263.000,00	555.953.897.627,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	581.489.446.000,00	596.054.820.134,84
II	BELANJA		
1	Belanja Operasi	440.456.774.165,18	399.366.849.558,56
2	Belanja Modal	146.883.877.865,00	132.632.389.185,00
3	Belanja Tidak Terduga	1.271.618.078,94	143.101.000,00
4	Transfer	37.766.618.000,00	34.283.733.236,00
	JUMLAH BELANJA	626.378.888.109,12	566.426.072.979,56

- b) Melakukan analisis varians dengan membandingkan selisih antara realisasi anggaran daerah dengan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2007 dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase (%). Berikut adalah hasil analisis varians pada ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan tahun anggaran 2007.

Tabel 5.13
Analisis Varians
(Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALIASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah	33.960.183.000,00	37.100.922.507,84	3.140.739.507,84	109,25
2	Pendapatan Transfer	545.529.263.000,00	555.953.897.627,00	10.424.634.627,00	101,91
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	150
	JUMLAH PENDAPATAN	581.489.446.000,00	596.054.820.134,84	14.565.374.134,84	102,50
1	Belanja Operasi	440.456.774.165,18	399.366.849.558,56	158.910.075.393,38	90,67
2	Belanja Modal	146.883.877.865,00	132.366.849.558,56	14.251.488.680,00	90,30
3	Belanja Tak Terduga	1.271.618.078,94	143.101.000,00	1.128.517.078,94	11,25
4	Transfer	37.766.618.000,00	34.283.733.236,00	3.482.884.764,00	90,78
	JUMLAH BELANJA	626.378.888.109,12	566.426.072.979,56	59.952.815.129,56	90,43

c) Menarik Kesimpulan

Hasil analisis varians dapat diketahui pada bagian pendapatan bahwa realisasi lebih tinggi dari pada anggaran yang telah ditetapkan. Pada bagian belanja, realisasi anggaran belanja lebih rendah dari rencana anggaran yang berarti belanja untuk tahun anggaran 2007 bersifat menguntungkan.

Tabel 5.14
Kesimpulan Analisis Varians

URAIAN	%	KESIMPULAN
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Daerah	109,25	Meningkat
Pendapatan Transfer	101,91	Meningkat
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	150	Meningkat
JUMLAH PENDAPATAN	102,50	Meningkat
BELANJA RUTIN		
Belanja Operasi	90,67	Menguntungkan
Belanja Modal	90,30	Menguntungkan
Belanja Tak Terduga	11,25	Menguntungkan
Transfer	90,78	Menguntungkan
JUMLAH BELANJA RUTIN	90,43	Menguntungkan

2. Tingkat efisiensi daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2007 untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/ proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Tingkat efektivitas daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2007 untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan

yang dilaksanakan dengan melakukan perbandingan antara outcome dengan output, yaitu perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:

Analisis Efisiensi

- a) Mengumpulkan data mengenai Ringkasan Perhitungan APBD

Tahun 2007 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

URAIAN	REALISASI
Jumlah Total Realisasi Pendapatan menurut Pemerintah Daerah	Rp. 596.054.820.134,84
Jumlah Belanja/ Pengeluaran Rutin	Rp. 566.426.072.979,56

- b) Menghitung tingkat efisiensi dengan cara membandingkan antara realisasi pengeluaran rutin dengan total realisasi pendapatan dikalikan seratus (100) dalam bentuk persentase.

Analisis efisiensi pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/ proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input.

Tingkat Efisiensi Pengeluaran Rutin menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Pengeluaran Rutin}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 566.426.072.979,56}}{\text{Rp 596.057.820.134,84}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{95,02\%}
 \end{aligned}$$

c) Menarik kesimpulan

Hasil analisis efisiensi dapat diketahui:

Tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan untuk Tahun Anggaran 2007 sebesar 95,02% yang berarti kurang efisien.

Analisis Efektivitas

a) Mengumpulkan data mengenai Ringkasan Perhitungan APBD

Tahun 2007 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

URAIAN	REALISASI
Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp. 596.054.820.134,84
Jumlah Anggaran Pendapatan	Rp. 581.489.466.000,00

b) Menghitung tingkat efektivitas dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dikalikan seratus (100) dalam bentuk persentase.

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program

atau kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan perbandingan antara outcome dengan output.

Tingkat Efektivitas menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan:

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 596.054.820.134,84}{\text{Rp } 581.489.446.000,00} \times 100\% \\
 &= \mathbf{102,50 \%}
 \end{aligned}$$

c) Menarik kesimpulan

Hasil analisis efektivitas dapat diketahui:

Tingkat efektivitas daerah menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan untuk Tahun Anggaran 2007 sebesar 102,50% yang berarti sangat efektif.

D. Pembahasan

Setelah penulis mengadakan analisis data yang terdiri dari analisis varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan, analisis efisiensi, dan analisis efektivitas daerah, maka perlu ada pembahasan lebih lanjut dari hasil analisis tersebut.

Pembahasan pertama adalah mengenai hasil analisis varians dan pembahasan kedua mengenai hasil analisis efisiensi dan analisis efektivitas.

1. Pembahasan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan di lihat dari APBD dengan menggunakan analisis varians.

1) Pendapatan

Pada bagian pendapatan, jumlah pos pendapatan varians sebesar Rp 14.565.374.134,84 yang berarti realisasi pendapatan naik mencapai 2,50% (102,50% - 100%) dari anggaran yang telah ditetapkan.

(a) Pendapatan Asli Daerah

Bagian pendapatan asli daerah sendiri, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha daerah dan lain-lain pendapatan varians sebesar Rp 3.140.739507,84 artinya realisasi pada pos pendapatan untuk bagian pendapatan asli daerah naik dari anggaran yang telah ditetapkan.

(b) Pendapatan Transfer

Bagian pendapatan transfer yang terdiri atas pos transfer pemerintah Pusat – dana perimbangan, transfer pemerintah pusat – lainnya, dan transfer pemerintah propinsi varians sebesar Rp 10.424.634.627,00 artinya realisasi pada pos pendapatan untuk bagian pendapatan transfer naik dari anggaran yang telah ditetapkan.

(c) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Bagian lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya varians sebesar Rp 1.000.000.000,00 artinya realisasi pada

pos pendapatan untuk bagian lain-lain pendapatan yang sah naik dari anggaran yang telah ditetapkan.

2) Belanja

Pada bagian jumlah pos belanja varians sebesar Rp 59.952.815.129,56 dimana realisasi belanja turun dari anggaran yang telah ditetapkan dan berarti menguntungkan yang mencapai 9,57% (100% - 90,43%).

(a) Belanja Operasi

Pada belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial varians sebesar Rp 158.910.075.393,38 artinya realisasi pada pos belanja untuk bagian belanja operasi turun dan diartikan menguntungkan.

(b) Belanja Modal

Pada belanja modal terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya varians sebesar Rp 14.251.488.680,00 artinya realisasi pada pos belanja untuk bagian belanja modal turun dan diartikan menguntungkan.

(c) Belanja Tidak Terduga

Pada belanja tidak terduga varians sebesar Rp 1.128.517.078,94 artinya realisasi pada pos belanja untuk bagian belanja tidak terduga turun dan diartikan menguntungkan.

(d) Transfer

Pada transfer varians sebesar Rp 3.482.884.764,00 artinya realisasi pada pos belanja untuk bagian transfer turun dan diartikan menguntungkan.

2. Pembahasan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas daerah Kabupaten Magetan.

Tingkat Efisiensi

Dengan menggunakan rumus tersebut diatas, maka dapat diketahui tingkat efisiensi Pengeluaran Rutin daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2007 dengan tingkat efisiensi sebesar 95,02%, yang berarti kurang efisien dan dapat dikatakan tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Magetan adalah kurang efisien.

Tingkat Efektivitas

Dengan menggunakan rumus tersebut diatas, maka dapat diketahui tingkat efektivitas daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2007 dengan tingkat efektivitas sebesar 102,50%, yang berarti sangat efektif dan dapat dikatakan tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Magetan adalah sangat efektif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp 596.054.820.134,84 lebih besar daripada anggaran pendapatan sebesar Rp 581.489.446.000,00 sehingga dalam realisasinya terjadi varians (selisih lebih) sebesar Rp 14.565.374.134,84 atau lebih tinggi sebesar 2,50% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada pos belanja, jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 566.426.072.979,56 lebih kecil dari pada anggaran belanja sebesar 626.378.888.109,12 sehingga dalam realisasinya terjadi varians sebesar Rp 59.952.815.129,56 atau lebih rendah 9,57% dari anggaran yang telah ditetapkan.
2. Tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dimana selama periode penelitian tahun anggaran 2007 dengan tingkat efisiensi sebesar 95,02% yang berarti kurang efisien dan dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Magetan adalah kurang efisien.

Tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dimana selama periode penelitian tahun anggaran 2007 dengan tingkat efektivitas sebesar

102,50% yang berarti sangat efektif dan dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Magetan adalah sangat efektif.

B. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Penulis hanya meneliti satu tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yaitu Tahun Anggaran 2007.
2. Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan penulis hanya menggunakan teknik analisa varians, efisiensi dan efektivitas.

C. Saran

1. Sebaiknya penulis selanjutnya tidak hanya meneliti satu tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yaitu Tahun Anggaran 2007.
2. Dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sebaiknya penulis tidak hanya menggunakan teknik analisis varians, efisiensi dan efektivitas tetapi dengan menggunakan teknik analisis *balance score card* dan *value for money*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra dan Soepriyanto. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba empat.
- Bastian, Indra. (2005). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Golu, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah, Seri Akuntansi Sektor Publik*, Edisi pertama. Jakarta: salemba Empat.
- Insani, Sri. (2004). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Berbasis Kinerja. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. (Tidak Dipublikasikan).
- Jones, Rowan dan Pendlebury. (2000). *Public Sector Accounting*, Edisi kelima. Prentice Hall
- Mamesah, D. J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- (2003). *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Makalah Seminar Nasional MEP. UGM. Yogyakarta.
- Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nadaek, Ruslina. (2003). Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah daerah. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. (Tidak Dipublikasikan).
- Nugroho, Damasus. (2003). Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. (Tidak Dipublikasikan)

- PAU SE UGM. (2003). *Penyusunan Anggaran (RAPBD) Berdasarkan Pendekatan Kinerja*. Yogyakarta.
(Tidak Dipublikasikan).
- Pemerintah Kabupaten Magetan. (2008). *Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Magetan Dalam Angka 2008*
- Pemerintah Kabupaten Magetan. (2008). *Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan*
- Pemerintah Kabupaten Magetan. (2008). *Kantor Departemen Agama Kabupaten Magetan*
- Republik Indonesia. (1996). *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Kinerja Keuangan*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah*. Penerbit Citra Umbara: Bandung.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Citra Umbara: Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN KETERTIBAN DAN KESATUAN BANGSA

70

Jl. Basuki Rachmat Timur No.1 Telp.895153
MAGETAN

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 072 / *DI* / 403.203 / 2009

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi.
2. Menunjuk Surat dari Universitas Sanata dharma Yogyakarta Nomor : 31/ Kaprodi Akt./349 / XII / 2008, tanggal 11 Desember 2008 perihal ljin Survey .

MENERANGKAN / MENGIZINKAN

Nama Penanggung jawab : **NINING YUNITA ARTANTI**
 Fakultas / Program : Ekonomi / Akuntansi
 Pekerjaan : Mahasiswa / 042114094
 Alamat : Kampus Unersitas sanata dharma Yogyakarta
 Tempat : Bagian Keuangan Setdakab Magetan
 Tema : "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)"
 Peserta : -
 Lamanya : (dua) bulan
 Waktu pelaksanaan : Januari sld Pebruari 2009
 Untuk : Mengadakan Penelitian sebagaimana tersebut diatas

Ketentuan yang harus ditaati :

3. Mentaati ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Menjaga ketertiban, ketentraman serta menghindari pernyataan yang dapat melukai / menyinggung perasaan pihak lain.
5. Setelah berakhirnya Penelitian / survey, wajib melaporkan hasil penelitian / survey kepada Bupati Magetan Up. Kepala Badan Ketertiban dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Magetan.
6. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Magetan, 13 Januari 2009
 KEPALA BANTIB KESBANG
 KABUPATEN MAGETAN

SUDARYO, SH, M.Hum
 Pembina Tk.I
 NIP.510 166 788

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAGETAN

